PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah dalam usahanya meningkatkan pelayanan kesehatan, perlu melakukan kegiatan pemberian izin kepada pelayan kesehatan swasta sebagai tindakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Retribusi Perizinan Bidang Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737));
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167 / KAB / B. VIII / 1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1331 / Menkes / SK / X / 2002;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
7. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekan farmasi kepada masyarakat.
8. Optikal adalah suatu tempat dimana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep Dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri.
9. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga Dokter / Bidan / Perawat / fisioterafis yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
10. Rumah Sakit adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialis tertentu, pelayanan medik penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
11. Praktek berkelompok adalah penyelenggara pelayanan medik secara bersama oleh Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
12. Balai Pengobatan (Klinik) adalah tepat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.
13. Balai Kesejahteraan Ibu dan anak yang selanjutnya disingkat BKIA adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi, anak prasekolah dan pelayanan keluarga berencana.
14. Rumah bersalin adalah tempat menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta pelayanan bayi baru lahir.
15. Tukang Gigi adalah mereka yang melakukan pekerjaan dibidang penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan gigi dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan Kedokteran Gigi, yang kewenangannya terbatas pada membuat gigi tiruan lepasan dari akrilik sebagian atau penuh dan memasang gigi tiruan lepasan.
16. Toko Obat adalah tempat yang memiliki izin untuk menyimpan obat – obat bebas dan obat – obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran ditempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.
17. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematology, mikro biologi klinik, himonologi klinik dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk penunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

18. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikro biologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama yang menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.
19. Laboratorium Gigi adalah tempat usaha untuk melakukan pengolahan, pencampuran dan perubahan bentuk bahan kimia dalam rangka pembuatan gigi palsu.
20. Praktek Swasta Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter spesialis atau Dokter Gigi Spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
21. Surat Izin Kerja Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat untuk melakukan praktek keperawatan disarana pelayanan kesehatan.
22. Surat Izin Praktek Fisioterafis yang selanjutnya disingkat SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Fisioterafis untuk menjalankan praktek Fisioterafis.
23. Surat Izin Praktek Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat untuk menjalankan praktek Perawat perorangan / berkelompok.
24. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan / atau perawatan dengan cara obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun – temurun dan / atau pendidikan / pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
25. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
26. Surat Izin Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
27. Pengobat Tradisional Keterampilan adalah pengobat tradisional pijat urat, patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupresuris, akupunkturis, chiropractor dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
28. Pengobat Tradisional Ramuan adalah pengobat tradisional ramuan Indonesia (jamu), guruh, tabib, shinshi, homoeopathy, aromatherapist dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
29. Pengobat Tradisional Pendekatan Agama terdiri dari pengobat tradisional dengan pendekatan Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu atau Budha.
30. Pengobat Tradisional Supra Natural adalah pengobat tradisional tenaga dalam (prana), paranormal, reiky master, gigong, dukun kebatinan dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
31. Sertifikat Penyuluhan adalah sertifikat yang diberikan kepada Pengusaha produksi pangan industri kecil rumah tangga setelah mengikuti penyuluhan keamanan pangan serta diperiksa sarana produksinya dan memenuhi persyaratan kesehatan.
32. Surat Penugasan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga medis yang telah mendaftarkan diri (registrasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – perundangan yang berlaku.

33. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan pelayanan bidang kesehatan di daerah wajib memiliki izin.
- (2) Untuk memperoleh Izin Bidang Kesehatan, orang pribadi atau badan mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala Dinas bila segala persyaratan telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan izin diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Izin kegiatan pelayanan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin bagi Pelayanan Medik Dasar yaitu :
 1. izin Praktek Dokter Umum;
 2. izin Praktek Dokter Gigi;
 3. izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Umum;
 4. izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Gigi;
 5. izin Praktek Bidan;
 6. izin Praktek Perawat;
 7. izin Kerja Perawat;
 8. izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan (Klinik);
 9. izin Penyelenggaraan BKIA;
 10. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin (RB);
 - b. Izin bagi Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan) yaitu :
 1. Izin Praktek Dokter Spesialis;
 2. Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis;
 3. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis;
 4. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
 - c. Izin bagi Pelayanan Medik Penunjang yaitu :
 1. Izin Apotek;
 2. Izin Penyelenggaraan Labotarium Klinik;
 3. Izin Penyelenggaraan Labotarium Kesehatan Masyarakat;
 4. Izin Penyelenggaraan Labotarium Gigi;
 5. Izin Praktek Fisioterafis;